

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai status keuangan negara dan tantangan utama dalam pengawasan pada BUMN pasca rekonstruksi status keuangan negara pada BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keuangan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengatur BUMN sebagai badan hukum privat.
2. Tantangan utama dalam pengawasan sebagai akibat dari rekonstruksi kedudukan keuangan negara pada BUMN pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah, Pertama, Kendala pelaksanaan Pengawasan Internal. Kedua, pembatasan kewenangan pemeriksaan oleh BPK. Ketiga, keluarnya Organ BUMN sebagai penyelenggara negara.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah perlu mengharmonisasikan konsep keuangan negara dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan keuangan negara pada BUMN. Upaya harmonisasi ini sangat penting untuk mengeliminasi pertentangan antar norma. Dengan demikian, dualisme mengenai kedudukan keuangan negara pada BUMN dapat diakhiri, sehingga mewujudkan kepastian hukum.
2. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah wajib menerapkan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penerapan prinsip ini akan menjamin, bahwa produk Undang-Undang yang dihasilkan tidak hanya merefleksikan kesepakatan politis semata, melainkan mencerminkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Ketiga, peningkatan koordinasi yang sinergis, antara pengawasan secara internal dengan institusi pengawasan oleh Negara. Sinergitas ini penting untuk menjamin BUMN dapat beroperasi secara transparan, efisien dan akuntabel, sehingga mampu mengurangi ketergantungan suntikan dana APBN. Pengawasan yang terkoordinir tersebut harus diarahkan untuk memastikan BUMN yang tidak hanya berfokus pada profit saja, melainkan juga mengedepankan pemenuhan kewajiban pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, Maftuh Effendi, dan M. Dzul Ikram., 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, KENCANA, Jakarta.
- Alfin Sulaiman., 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT Alumni Penerbit Akademik, Bandung.
- Bintoro Tjokromidjojo., 1994, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Elda Adira., 2020, *HUKUM ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta.
- H. Mulkan dan S. Aprita., 2023, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati., 2017, *Hukum Keuangan Negara dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riawan Tjandra.W., 2023, *Hukum Keuangan Negara*, PT KANISIUS, Yogyakarta.
- Rudhi Prasetya., 2011, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Khairandy., 2003, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soeroso., 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Anisa Fitria, Nur Apipah, 2025, “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.5 Nomor.2 Agustus 2025, Universitas Esa Unggul. DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537>
- Dellah, Juanda, Ogiandhafiz, “Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003”, *Jurnal Balitbangdalamung*, Vol.13/No.01/April/2025, Universitas Esa Unggul Jakarta. DOI: <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.1151>
- Jeane Sugiharto, 2021, “Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Education and development Institut*

Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 Nomor 1 Februari 2021, Universitas Surabaya. DOI: 10.37081/ed.v9i1.2329

Katriel Mura, Maria Sisilia, 2025, “Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.-2 Nomor.1 Januari 2025, Politeknik Negeri Kupang. DOI:10.62282/juilmu.v2i1.87-100

Lisnawati, 2011, “Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat*, Vol. XI, No.1/I/Puslit/Januari/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

M. Viktoris Dahoklory, 2020, “Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal “Dilema” antara Kerugian Negara ataukah Kerugian Bisnis”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9/No.9/Desember 2020, Universitas Diponegoro. DOI:10.33331/rechtsvinding.v9i3.457

Zainal.A, L. Wira Pria.S, Usma, 2019, “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam BUMN”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4/No.2/Desember 2019, Universitas Mataram. DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.29>

Skripsi

Margareth, 2020, *Konsep Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana.

Rihsan Novendi, 2018, *Kedudukan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Dan Dijadikan Modal BUMN (PERSERO)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Andalas.

Siti Aisyah Khumaera Jannah, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardinah Mantan Dirut PT. Pertamina)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Sumber Elektronik

Ady Thea, 2025, Revisi UU BUMN Digodok Lagi Akademisi Ingatkan Risiko Hapus Status Penyelenggara Negara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-bumn-digodok-lagi--akademisi-ingatkan-risiko-hapus-status-penyelenggara-negara-lt68d49cf1b6416/?page=1>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

Bank Indonesia, 2025, Tujuan Kebijakan Moneter. diakses <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>, diakses pada tanggal 26 September 2025.

- CR21/ANT, 2025, Ini Point Penting PP Penyertaan Modal Negara Bagi BUMN, hlm.1, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-pp-penyertaan-modal-negara-bagi-bumn-lt5878d05720044/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Danantara Indonesia, 2025, Daya Anagata Nusantara "Untuk Kemakmuran Indonesia". <https://www.danantaraindonesia.com>, diakses pada tanggal 27 September 2025.
- Erman Rajagukguk, 2012, Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara. <http://www.hukumonline.com-kekayaan-bumn-bukan-kekayaan-bagian-kekayaan-negara>, diakses pada tanggal 24 September 2025.
- Giovani, 2025, Mengenal Perusahaan Induk Investasi (Holding Investasi) pada Danantara: Memahami Struktur dan Manfaatnya, MARINews.mahkamahagung.go.id <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perusahaan-induk-investasi-danantara-0tO>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.
- Hanifah Dwi Jayanti, 2025, PT BKI jadi Kendaraan Danantara, Berikut 14 Emiten BUMN yang alihkan Saham ke Holding, hlm.1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pt-bki-jadi-kendaraan-danantara-berikut-14-emiten-bumn-yang-alihkan-saham-ke-holding-lt67e4e49b03a5d/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2025.
- Indonesia Corruption Watch, 2023, Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan <https://antikorupsi.org/id/rangkap-jabatan-komisaris-dan-dewan-pengawas-badan-usaha-milik-negara>, diakses pada tanggal 7 November 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025, KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN, hlm.1, kpk.go.id <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn>, diakses pada tanggal 8 November 2025.
- Kementerian Keuangan RI, 2025, Danantara Membangun Masa Depan Keuangan Indonesia Melalui *Sovereign Wealth Fund*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bengkulu/id/data-publikasi/artikel/2915-danantara.html>, diakses pada tanggal 30 September 2025.
- Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2025, Pergeseran Makna “Penyelenggara Negara” dalam UU BUMN dan Pengaruhnya terhadap Kewenangan KPK. <https://www.mkri.id/berita/pergeseran-makna%E2%80%9Cpenyelenggara-negara%E2%80%9D-dalam-uu-bumn-dan-pengaruhnya-terhadap-kewenangan-kpk-2354>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

- Nael Yehezkiel, 2025, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi? <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukankerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/>, diakses pada tanggal 24 September 2025.
- Normand Edwin Elnizar, 2025, Pakar FHUI: Secara Hukum Keuangan BUMN Jelas Bukan Kekayaan Negara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-fhui--secara-hukum-keuangan-bumn-jelas-bukan-kekayaan-negara-lt6358b1f3c3e4a/>, diakses pada tanggal 29 September 2025.
- Rio Faisal, 2025, UU BUMN Bertentangan dengan Aturan Lain. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/uu-bumn-bertentangan-dengan-aturan-lain>, diakses pada tanggal 30 September 2025.
- Rastri Paramita, 2020, "EVALUASI PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BUMN PERIODE 2015-2019," Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN No. 02/an.PKA/PP/VI/2020, Pusat Kajian Anggaran DPR RI, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-47.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.
- W. Riawan Tjandra, 2014, Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN. <http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2025. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2004. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2016. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2025. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, Dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1827 Tahun 2018. Jakarta

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2023. Jakarta

Wawancara

Imanuel Haryanto, Pemeriksa Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII, diwawancarai pada Jumat, 7 November 2025. Pukul 10.00 WIB, melalui Zoom Online (Daring).

Satuan Kerja pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, diwawancarai tanggal 10 November 2025, Pukul 09.00 WIB, melalui Zoom Online (Daring).

Prayoedi Herlebeng, Kepala SPI PT Angkasa Pura Aviassi (Persero), diwawancarai tanggal 16 November 2025, Pukul 10.00 WIB, melalui Zoom Online (Daring).

Biro Hukum KPK, diwawancarai pada Kamis, 27 November 2025, Pukul 14.00 WIB, melalui Zoom Online (Daring).

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Tafsir Ruang Lingkup Keuangan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah Sebagai Objek Pemeriksaan BPK; dan Tafsir Mengenai Kewenangan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam BUMN, BUMD, atau Nama lain yang sejenisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Konstitusionalitas Keuangan Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN-PT) Sebagai Kekayaan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 tentang Kedudukan Keuangan Dana Pensiun Pertamina Dalam Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021 tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Audit Investigatif Terhadap Dana Pensiun Pertamina.

Buletin

UMBRA, 2025, Revisi UU BUMN: Perubahan Besar Tata Kelola BUMN dan Pembentukan BPI Danantara, 25 Februari 2025, <https://umbra.law/wp-content/uploads/2025/02/Client-Alert-Revisi-UU-BUMN-68019-v26-ID-68019.pdf>.

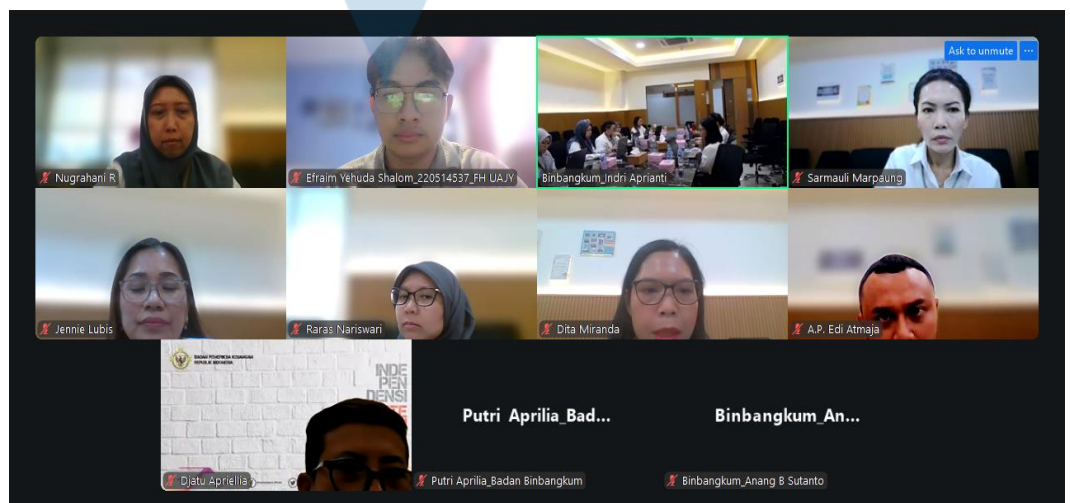
UMBRA, 2025, Revisi Keempat UU BUMN: Detail Pengaturan Baru Dalam Kerangka UU 16/2025, 15 Oktober 2025, <https://umbra.law/wp-content/uploads/2025/10/Client-Alert-UU-16-2025-76517-v25.pdf>.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Bapak Imanuel Haryanto, S.E., M.SI., CA., Ak., ACPA, CSFA., selaku Pemeriksa Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII.



2. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Satuan Kerja Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.



3. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Bapak Prayoedi Herlebeng, SSiT, QIA, CIAE, CRMP, selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT. Angkasa Pura Aviassi Bandara Kuala Namu Medan (BUMN Persero).



4. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

